

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta



Gambar 4.1 Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta beralamat di Jalan. K.S. Tubun No.1, RT.2/RW.5, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260.

Dinas Pertamanan dan Pemakaman dibentuk sejak diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penggabungan ini didasarkan atas dasar bahwa kedua unit pelaksanaan otonomi ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas dan wewenang untuk membangun dan mengelolakan, jalur hijau, keindahan kota dan makam yang merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau Kota. Sebelum bergabung dengan Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan pertamanan,

penghijauan dan keindahan kota Jakarta merupakan tanggungjawab Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta berawal dari *Aafdeling Beplantingen* di bawah pemerintahan Hindia Belanda di *Gemeente* Jakarta, yang pada tahun 1970 menjadi cikal bakal Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta yang kita kenal saat ini. Transisi ini mencerminkan evolusi perawatan taman dari struktur administratif yang berbeda, seiring berjalannya waktu dan perubahan kebutuhan kota. Dari bentuk awalnya sebagai bagian dari *Gemeente* Jakarta di bawah kekuasaan Belanda, menjadi Seksi Taman-taman di bawah Djawatan Pekerdjaan Oemoem Kotapradja Djakarta, kemudian berkembang menjadi entitas yang mengelola dan merawat taman serta ruang publik di Jakarta. Perjalanan panjang ini memberikan landasan bagi pemeliharaan ruang hijau serta pemanfaatan taman sebagai aset publik yang berharga dalam kehidupan masyarakat Jakarta.

Diprakarsai oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 1961 merekomendasikan perlunya penataan pertamanan kota Jakarta agar dapat setara dengan ibukota negara lain di dunia. Pada tahun 1962 Pemerintah DKI Jakarta mendirikan Akademi Pertamanan (AKAP) yang para lulusannya dapat langsung bekerja di Seksi Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Pada masa periode 1962 – 1970, Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta hanya merupakan Seksi Pertamanan pada Bagian Pekerjaan Kota, Dinas Pekerjaan Umum DCI Jakarta, serta Seksi Pertamanan pada Suku-Suku Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Kota. Saat itu para pekerja lapangan lebih akrab dengan nama "Bagian Taman-Taman". Pada Tahun 1970, dengan SK Gubernur Nomor cd3/1/1/1970 Tanggal 3 Agustus 1970, dibentuk Dinas Pertamanan DKI Jakarta, dengan Struktur Organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Perencanaan, Bagian Pelaksanaan/ Pemeliharaan, Bagian Umum, Suku Dinas Pertamanan di setiap wilayah kota. Pada Tahun 1976, dengan SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor B.VII/3400/2/1/76 tanggal 8 Juni 1976, Struktur Organisasi Dinas Pertamanan disempurnakan menjadi: Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Urusan Perencanaan, Urusan Pengadaan,

Urusan Pembangunan Taman, Urusan Pemeliharaan Taman, Urusan Bimbingan Pertamanan, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Suku Dinas Pertamanan di setiap Wilayah Kota, Penilik Pertamanan di setiap kecamatan.

Selanjutnya pada Tahun 1983 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 061.131.165 tanggal 13 April 1983, disahkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Dengan Perda tersebut, maka Struktur Organisasi Dinas Pertamanan menjadi: Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Sub Dinas Bina Program, Sub Dinas Perencanaan, Sub Dinas Tanaman Taman dan Penghijauan, Sub Dinas Pembangunan Taman. Sub Dinas Pemeliharaan dan Penertiban Taman, Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan Pertamanan, Bagian Administrasi, Bagian Perbekalan, Perlengkapan dan Pemeliharaan, Suku Dinas Pertamanan di setiap Wilayah Kota, Seksi Petamanan Kecamatan di setiap Kecamatan.

Pada tahun 1997 pengembangan organisasi kembali dilakukan, dimana dengan Perda Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 27 Mei 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota, maka nama Unit kembali menjadi Dinas Pertamanan dan Keindahan kota, dengan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut: Unsur Pimpinan Dengan komposisi Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas, Sub Dinas Bina Program , Sub Dinas Perancangan , Sub Dinas Tanaman Taman, Sub Dinas Pembangunan, Sub Dinas Pemeliharaan. Sub Dinas Bimbingan. Bagian Perlengkapan dan Perawatan material. Bagian Administrasi, Suku Dinas Pertamanan di setiap Kotamadya, Seksi Pertamanan Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan.

Pada tahun 2001, sesuai dengan pelaksanaan perampingan struktur organisasi Pemerintahan, maka Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota, kembali disesuaikan strukturnya. Dalam pembahasan awal, Dinas Pertamanan akan dimerger dengan Dinas Kehutanan, Dinas Tata Pemukiman Umum, Kanwil Kehutanan. Namun karena perbedaan sektor, maka rencana merger dilaksanakan sesuai sektor masing-masing dan Dinas Pertamanan dan

Keindahan Kota melalui Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2002 berdiri sendiri dengan nama Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta.

Sedangkan untuk Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebelum bergabung dengan Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengalami beberapa pergantian nomenklatur. Secara historis pelayanan pemakaman struktur berasal dari salah satu Urusan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta. Adapun pedoman operasional pelayanan pemakaman pada waktu itu masih mengacu kepada peraturan-peraturan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yakni *Bataviasche Begraafplatsen Reglement 1937* dan *Bataviasche Graafrechten Verordening 1937*.

Pada masa sebelum tahun 1969, urusan pelayanan pemakaman masih tetap menjadi Urusan Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta di atas, namunkarena pesatnya perkembangan kota Jakarta, maka Urusan Pemakaman dibutuhkan eksistensinya menjadi suatu Organisasi yang berdiri sendiri. Dengan mendapat perhatian Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: Ce.5/1/1/1969 tanggal 13 Agustus 1969 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota (DCI) Djakarta. Kemudian pada tahun 1971 disempurnakan kembali struktur organisasi Dinas Pemakaman tersebut dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: Ce.5/1/1/1971 tanggal 17 Maret 1971 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

Selanjutnya pada tahun 1977, penyempurnaan organisasi dinas pemakaman dilakukan kembali melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor: 105 Tahun 1977 tanggal 22 Pebruari 1977 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tahun 1995, melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1995 nomenklatur Dinas Pemakaman Daerah

Khusus Ibukota Jakarta berubah menjadi Dinas Tata Pemakaman Umum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kedudukan Dinas Tata Pemakaman Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan salah satu unit kerja penunjang pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pelayanan pemakaman umum berubah kembali nomenklaturnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 136 Tahun 2001 dari Dinas Tata Pemakaman Umum Propinsi DKI Jakarta menjadi Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedua unit tersebut yaitu Dinas Pertamanan dan Kantor Pelayanan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi penggabungan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi dengan Bidang Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta menjadi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

4.1.1 Visi Misi Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta

Visi:

“Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi warga”

Adapun pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut
Ruang Terbuka Hijau adalah:

1. Area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No.5/PRT/M/2008)
2. Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman bagi warga kota adalah suatu kondisi yang menimbulkan rasa segar, sejuk dan enak

3. Ruang Terbuka Hijau yang Maju bagi warga kota adalah memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
4. Ruang Terbuka Hijau yang Lestari bagi warga kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "lestari" adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.
5. Ruang Terbuka Hijau yang Terjangkau bagi warga kota adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "terjangkau" adalah tercapai, sehingga diharapkan RTH di Jakarta adalah RTH yang terhubung dan dekat dengan tempat tinggal dan pusat-pusat aktivitas sehingga mudah dicapai oleh seluruh warga kota serta memudahkan keterlibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan Ruang Terbuka tersebut.

Misi:

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman dan Pemakaman yang nyaman sebagai ruang aktivitas dan kreativitas publik;
2. Meningkatkan Pelayanan dan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

3. Mewujudkan konservasi flora dan fauna yang memperkuat daya dukung lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada pelayanan publik.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan DKI

Jakarta

Tugas Pokok:

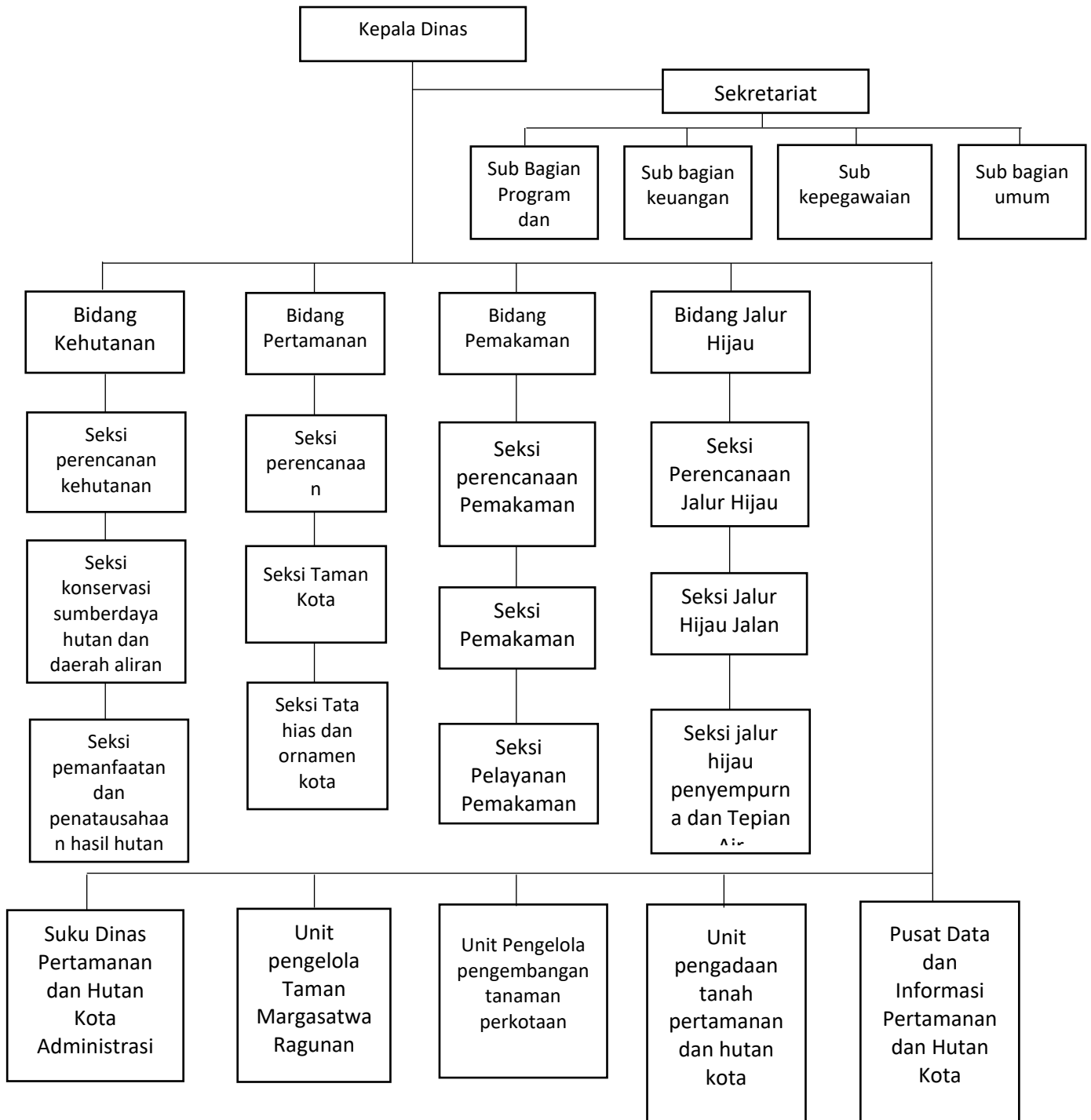
Melaksanakan Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman

Fungsi:

1. Penyusunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Kehutanan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
3. Pembangunan taman, jalur hijau, pemakaman dan keindahan kota;
4. Penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, keindahan kota dan makam;
5. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan makam, taman, jalur hijau, dan keindahan kota;
6. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan / atau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman;
7. Pengembangan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan pemakaman;
8. Penyediaan tanah makam, pemetakan tanah makam, dan tata keindahan taman pemakaman umum;
9. Pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;
10. Penyelenggaraan penggalian dan atau pemindahan jenazah
11. Pemungutan, penatausahaan, penyeteran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan dan pemakaman;

12. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan pemakaman.
13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman;
14. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Kehutanan;
16. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta

4.2 Efektivitas Implementasi Program Taman Maju Bersama dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Pada subbab ini akan dibahas secara mendalam mengenai efektivitas implementasi Program Taman Maju Bersama terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Program ini telah menjadi salah satu inisiatif kunci dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta dan menjaga keberlanjutan lingkungan kota. Dengan fokus pada bagaimana program ini telah dijalankan, apa saja pencapaiannya, dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di ibu kota Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas program ini, akan dapat mengevaluasi sejauh mana upaya pemerintah telah berhasil dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

4.2.1 Keberhasilan Program

Guna memperoleh informasi mendalam, peneliti melakukan wawancara kepada 6 informan dengan rincian 4 informan merupakan pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, 2 informan merupakan masyarakat.

Informan 1 merupakan Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan. Pemilihan informan ini didasarkan pada perannya yang sebagai bagian dari pemerintah daerah DKI Jakarta, khususnya di Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta yang terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan Program Taman Maju Bersama serta pengelolaan RTH.

Informan 2 merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan. Pemilihan informan ini didasarkan pada perannya yang sebagai bagian dari pemerintah daerah DKI Jakarta, khususnya di Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta yang terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan Program Taman Maju Bersama serta pengelolaan RTH.

Informan 3 merupakan Staff Umum Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan informan 4 adalah Staff Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pemilihan yang bersangkutan menjadi informan 3 dan 4 dalam penelitian ini didasarkan pada perannya yang merupakan staff pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, di mana tentunya berkaitan langsung dengan program Taman Maju Bersama ini, baik bersifat umum maupun bersifat teknis.

Informan 5 dan 6 adalah salah satu masyarakat DKI Jakarta yang merupakan pengguna dari Taman Maju Bersama. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Informan 5 dan 6 adalah masyarakat yang tinggal di sekitar RTH atau yang aktif menggunakan dan mengunjungi RTH tersebut. Informan 5 dan 6 dapat memberikan pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait efektivitas program dan pengelolaan RTH.

Peneliti mengajukan pertanyaan Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai Program Taman Maju Bersama dan pengelolaan RTH di DKI Jakarta, kepada Informan 1, yang langsung ditanggapi seperti berikut:

“Taman Maju Bersama itu sebenarnya kayak brandingnya aja, sih. Branding dari sebuah program. Sebenarnya adalah ruang terbuka hijau. Secara aturan pun memang begitu seharusnya. Tapi, dulu kan kalau diomongin ruang terbuka hijau, kurang seksi kali, ya. Kurang tersampaikan, kayak terlalu boring. Tapi, taman maju bersama ini memang lebih aktif kegiatannya. Seperti taman kota, taman lingkungan, taman RT, taman RW, taman Kelurahan, yang semangat pembangunannya adalah dari bottom. Jadi pemerintah punya program, lalu proses untuk menggali fasilitas warga, itu dari warga, lewat observasi, FGD dengan masyarakat. Pengelolaannya, seharusnya semangatnya dilakukan juga oleh warga” (Informan 1)

Dalam wawancara di atas, Informan 1 menjelaskan bahwa Program Taman Maju Bersama sebenarnya adalah upaya branding dari konsep ruang terbuka hijau. Dalam hal ini, perubahan istilah dari "ruang terbuka hijau" menjadi "Taman Maju Bersama" mencerminkan upaya untuk menciptakan citra yang lebih menarik dan komunikatif bagi masyarakat, sehingga mencapai tujuan program dengan lebih efektif.

Adapun tanggapan dari informan 2 yaitu:

“Jadi taman maju bersama itu kan salah satu kegiatan strategis gubernur atau visi misinya beliau, pak Anis Baswedan. Nah, itu memang program beliau untuk menjadikan ruang terbuka hijau sebagai ruang ketiga. Artinya kalau bekerja atau sekolah, gak mesti ke rumah dulu untuk bersosialisasi. Untuk konsepnya sendiri ini memang melibatkan masyarakat. Kita membuat FGD di mana dalam prosesnya kita mengutamakan, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, kita gak tiba-tiba ngasih gambar dan lain sebagainya.” (Informan 2)

Dari kutipan hasil wawancara Informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa pengembangan taman merupakan salah satu kegiatan strategis yang terkait dengan visi misi Gubernur Anies Baswedan. Ada fokus yang jelas untuk menjadikan ruang terbuka hijau sebagai apa yang disebut sebagai "ruang ketiga". Konsep ini mengusulkan bahwa ruang terbuka publik, seperti taman, dapat menjadi tempat di mana orang-orang dapat bersosialisasi tanpa harus kembali ke rumah terlebih dahulu setelah bekerja atau sekolah. Lebih jauh, strategi pengembangan ini melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka menggunakan pendekatan yang inklusif, dengan melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) untuk memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat sebelum merancang atau mengimplementasikan proyek taman. Pendekatan

ini menunjukkan pentingnya mendengarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat daripada sekadar memberikan solusi yang didasarkan pada pandangan pihak eksternal semata. Misi ini tampaknya berfokus pada penciptaan ruang publik yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan langsung dari masyarakat yang bersangkutan.

Adapun tanggapan dari informan 3 dan 4 yaitu:

“Program Taman Maju Bersama adalah inisiatif pemerintah untuk pengembangan taman dan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta. Pemahaman saya tentang program ini melibatkan upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan ketersediaan RTH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” (Informan 3)

Hasil wawancara dengan Informan 3 mengungkapkan bahwa Program Taman Maju Bersama merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan taman dan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta. Informan 3 menyatakan bahwa pemahamannya tentang program ini melibatkan upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan ketersediaan RTH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jawaban dari informan 4 yaitu:

“Betul, program ini sangat didukung oleh masyarakat, secara teknis saya melihatnya dilapangan bahwa ruang terbuka hijau sangat didambakan oleh masyarakat.” (Informan 4)

Pernyataan dari Informan 4 menunjukkan bahwa Program Taman Maju Bersama sangat didukung oleh masyarakat. Dilihat dari perspektif teknis, Informan 4 mengamati bahwa ruang terbuka hijau sangat diinginkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang kuat dari masyarakat untuk memiliki ruang terbuka hijau di lingkungan mereka.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai Program Taman Maju Bersama dan pengelolaan RTH di DKI Jakarta pada informan 5. Berikut adalah tanggapan yang bersangkutan:

“Itu program pembangunan dari pemerintah untuk memenuhi target 10%-20% RTH di DKI Jakarta, jadi melalui TMB ini. Kalau gak salah setiap tahunnya udah menganggarkan pembangunan untuk TMB ini. Cuman kalau lebih detail itu dinas lebih tau teknisnya itu.”
(Informan 5)

Dari hasil wawancara di atas, Informan 5 mengungkap pemahaman tentang program pembangunan Pemahaman akan "Program Paham" yang ditujukan untuk memenuhi target 10%-20% RTH (Ruang Terbuka Hijau) di DKI Jakarta. Melalui TMB (Taman, Masjid, dan Balai RW), program ini dilaksanakan. Setiap tahun, pemerintah sudah menganggarkan dana untuk pembangunan TMB ini. Informan menyadari bahwa untuk informasi yang lebih rinci dan teknis terkait dengan program ini, instansi terkait atau dinas terkait memiliki pengetahuan lebih mendalam. Adapun jawaban dari informan 6 yaitu:

“Jadi program TMB itu sebuah branding untuk pembangunan RTH di Jakarta. Jadi, sebetulnya pengelolaannya itu masuk dalam bagian dari penambahan Ruang Terbuka Hijau.” (Informan 6)

Pernyataan dari Informan 6 di atas menggambarkan konsep penting terkait program TMB (Taman Maju Bersama) sebagai sebuah *branding* dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Jakarta. Menurut informasi yang disampaikan, program TMB adalah bagian dari strategi branding untuk mengilhami dan memperkenalkan konsep RTH secara lebih luas kepada masyarakat. Penekanan pada pengelolaan program ini sebagai bagian dari

peningkatan RTH menunjukkan bahwa program TMB tidak hanya berfungsi sebagai suatu entitas terpisah, melainkan terintegrasi ke dalam usaha perluasan ruang terbuka hijau yang lebih besar di wilayah tersebut. Dengan mengubah pendekatan branding, program TMB diarahkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH dan bagaimana program ini berperan sebagai bagian dari upaya memperluas ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Informan 5 dan 6 memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang tujuan program TMB dalam pengembangan RTH di Jakarta, namun, ia menyadari bahwa rincian teknis terkait pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut memerlukan pemahaman yang lebih dalam, yang mungkin dimiliki oleh dinas atau instansi terkait yang bertanggung jawab atas program tersebut.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya pengelolaan RTH dan manfaatnya bagi masyarakat, kepada Informan 1

“Jadi, manfaatnya pasti Jakarta kekurangan tempat bagi masyarakat untuk bersosialisasi, Jakarta kekurangan tempat yang memiliki pengendalian polusi, misalnya, banjir. Nah, taman ini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Tentunya kan setiap RTH itu kan ada radius pelayanannya, tergantung Permen ATR KBN Nomor 14 Tahun 2022 Tentang RTH itu sendiri. Masing-masing RTH itu ada radius pelayanannya, taman RT dia punya pelayanan radiusnya berapa, luasnya berapa. Itu manfaatnya tentunya sesuai radius tadi. Tapi secara keseluruhan, manfaatnya adalah pastinya menjadi bagian untuk selain berinteraksi, juga memperbaiki lingkungan keluarga, memperbaiki perkotaan. Jadi ruang terbuka hijau

ini bisa menjadi ekosistem juga bagi habitat. Misalkan, ada RTH Mangrove, bisa jadi habitat monyet misalnya kalau di sisi Utara itu. Ada habitat lainnya, ular, dan segala macam.” (Informan 1)

Dalam wawancara di atas, Informan 1 menjelaskan berbagai manfaat yang diberikan oleh Taman Maju Bersama bagi masyarakat Jakarta. Manfaat utamanya termasuk sebagai tempat untuk bersosialisasi dan juga sebagai solusi untuk mengatasi beberapa masalah kota, seperti polusi dan banjir.

Kemudian, peneliti bertanya mengenai Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya pengelolaan RTH dan manfaatnya bagi masyarakat. Berikut adalah tanggapan dari Informan 2:

“Kalau dilihat penting atau tidaknya RTH, itu pasti penting. Karena kalau di Jakarta sendiri kita tuh mungkin di wilayah selatan, timur, kita masih dapat taman-taman di sekitar lingkungan. Tp kalau mbanya ke barat, utara itu sulit sekali. Jd keberadaan RTH ini sangat penting dr sisi ekologi, edukasi, dan pengelolaannya juga otomatis kita memperhatikan juga saat pembangunan RTH. Itu sudah kita pikirkan matang-matang berapa kebutuhannya. Sehingga RTH itu menjadi terpelihara dan baik.” (Informan 2)

Dari hasil wawancara di atas, Informan 2 menjelaskan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta, khususnya dalam konteks ketersediaan taman dan area terbuka di beberapa wilayah. Informan menyatakan bahwa di sebagian wilayah Jakarta, seperti wilayah selatan dan timur, terdapat keberadaan taman yang cukup, tetapi keadaannya jauh berbeda di wilayah barat dan utara. Hal ini menyoroti kesenjangan dalam ketersediaan RTH di berbagai bagian kota.

Kemudian, peneliti bertanya mengenai Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya pengelolaan RTH dan manfaatnya bagi masyarakat, yang langsung ditanggapi oleh yang bersangkutan:

“Pengelolaan RTH dianggap sangat penting karena memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. RTH tidak hanya menyediakan lingkungan alam yang sehat, tetapi juga menciptakan ruang publik untuk rekreasi, kegiatan olahraga, dan pertemuan sosial. Selain itu, pengelolaan RTH dapat meningkatkan kualitas udara, mengurangi panas kota, dan meningkatkan estetika lingkungan.” (Informan 3)

“Pengelolaan RTH memang sangat penting karena tidak hanya memberikan manfaat ekologis, seperti menjaga keberagaman hayati dan konservasi lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. RTH merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, kegiatan olahraga, dan pertemuan sosial, yang membantu memperkuat ikatan antarwarga dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dianggap sangat penting karena memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Pertama, struktur yang dibangun dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan RTH akan sangat mempengaruhi proses dan pencapaian tujuan. Sebagai contoh, implementasi teknologi canggih dalam pemantauan kualitas udara dan keberlanjutan ekosistem dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH. Kedua, pengelolaan RTH sebagai bagian dari organisasi yang terbuka menunjukkan ketergantungan pada lingkungan sekitarnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan RTH dapat memperkuat hubungan

antara organisasi dan lingkungan, sejalan dengan prinsip bahwa kelangsungan hidup organisasi tergantung pada hubungannya dengan faktor eksternal. Ketiga, pernyataan bahwa manusia sebagai unsur penting dalam organisasi memiliki kemampuan, pandangan motivasi, dan budaya yang berbeda dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan RTH. Berbagai kebutuhan dan preferensi masyarakat terkait dengan penggunaan RTH dapat memerlukan pendekatan yang beragam untuk memastikan kepuasan dan partisipasi masyarakat. Keempat, kebijakan dan praktik manajemen yang ditetapkan oleh pihak berwenang dalam mengatur dan mengendalikan pengelolaan RTH sangat berpengaruh. Pemimpin atau pengelola RTH perlu mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan, mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi untuk mencapai tujuan pengelolaan RTH secara holistik.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pentingnya pengelolaan RTH dan manfaatnya bagi masyarakat. Berikut tanggapan Informan 5:

“Di suatu kota, khususnya kota besar, RTH itu penting. Kan kalau gak salah di DKI itu menyediakan RTH 10%-20% dari luas wilayah kotanya. Nah, kalau terkait udah tercapai atau belum kurang tau, mungkin itu bisa ditanyakan ke Dinas Pertamanan. Cuman kalau diliat sekarang, Pemda DKI sedang menggalakan pembangunan taman melalui TMB.” (Informan 5)

Dari hasil wawancara di atas, bahwa Informan 5 memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang kebutuhan akan RTH dalam sebuah kota besar seperti DKI Jakarta, namun, dia tidak memiliki informasi langsung terkait capaian persentase RTH atau detail teknis terkait hal tersebut. Kesadarannya terhadap upaya pembangunan taman melalui program TMB mencerminkan pemahaman tentang inisiatif pemerintah dalam menciptakan lebih banyak ruang terbuka

hijau dalam kota. Informan merekomendasikan untuk mendapatkan informasi lebih rinci dari pihak terkait, seperti Dinas Pertamanan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait capaian dan rencana pembangunan RTH di DKI Jakarta. Berikut adalah tanggapan dari Informan 6:

“Ya kalau bicara pengelolaan RTH di Jakarta, ya, sangat bermanfaat. Salah satu fungsi RTH itu adalah untuk berkumpul masyarakat di situ bisa untuk sebagai ruang sosialisasi, edukasi. Kalau di runut lebih jauh, bisa untuk mengurangi tensi atau ketegangan masyarakat di Jakarta yang sangat padat. Kalau bicara manfaatnya jelas bermanfaat sekali.” (Informan 6)

Hasil wawancara dengan Informan 6 mengungkap pemahaman mendalam tentang pentingnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. Menurut informasi yang disampaikan, pengelolaan RTH bukan hanya tentang penciptaan ruang fisik, tetapi juga tentang fungsi sosial dan edukatif yang sangat signifikan. Menurut pandangan informan, RTH bukan hanya tempat berkumpul masyarakat, tetapi juga sebagai ruang untuk sosialisasi dan edukasi. Menariknya, informan menjelaskan bahwa RTH memiliki peran lebih dalam dalam konteks Jakarta yang padat, yakni dalam meredakan tensi atau ketegangan yang sering dirasakan oleh masyarakat di tengah padatnya perkotaan. Dengan demikian, RTH bukan hanya menjadi area rekreasi, tetapi juga sebagai solusi bagi ketegangan sosial yang timbul akibat kepadatan kota. Informasi dari wawancara ini menekankan bahwa pengelolaan RTH bukan sekadar pemenuhan kebutuhan akan ruang terbuka, melainkan memiliki dampak yang lebih dalam dalam mendukung aspek sosial dan kesejahteraan mental masyarakat di lingkungan perkotaan.

Selanjutnya, peneliti bertanya mengenai Apakah program Taman Maju Bersama dianggap berhasil, kepada Informan 1. Berikut tanggapan dari yang bersangkutan:

“Yang pasti, sih belum kita lakukan pengukuran QPInya. Tapi secara penglihatan kita, yang pasti taman maju bersama itu bermanfaat bagi masyarakat, dan ada perubahan lingkungan masyarakat. Tapi, kan, alangkah baiknya ketika itu disajikan dengan QPI yang jelas. QPI itu masih terbangunnya dulu gitu. Tapi KPInya setelah dibangun apa yang akan terjadi dilingkungan sekitar itu belum kita kaji lebih jauh lagi.” (Informan 1)

Dalam data hasil wawancara di atas, terungkap bahwa meskipun belum ada pengukuran yang konkret terhadap *Quality Performance Indicator* (QPI) terkait Program Taman Maju Bersama, namun secara visual atau berdasarkan pengamatan awal, program ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan telah menghasilkan perubahan dalam lingkungan masyarakat setempat. Namun, informan menggarisbawahi pentingnya memiliki QPI yang jelas untuk mengukur efektivitas program ini lebih akurat.

Lalu, peneliti bertanya mengenai Apakah program Taman Maju Bersama dianggap berhasil, kepada Informan 2 yang langsung ditanggapi sebagai berikut:

“Kalau sebagaian besar berhasil, karena sebagian besar atau semuanya digunakan oleh masyarakat.” (Informan 2)

Hasil wawancara dari Informan 2 menunjukkan bahwa suatu inisiatif atau proyek dianggap berhasil berdasarkan sejauh mana proyek tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Implikasinya adalah bahwa keberhasilan suatu usaha tergantung pada adopsi dan penerimaan yang luas dari masyarakat. Jika sebagian besar atau seluruhnya dari proyek tersebut diadopsi dan digunakan oleh masyarakat, hal ini dianggap sebagai indikator

keberhasilan. Dalam konteks inisiatif publik atau pembangunan, kesuksesan proyek tidak hanya dilihat dari sejauh mana proyek tersebut diselesaikan atau berhasil diimplementasikan, tetapi lebih kepada seberapa efektif proyek itu menjadi bagian aktif dalam kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Jadi, kesuksesan tidak hanya terletak pada sejauh mana suatu proyek diselesaikan, tetapi lebih pada seberapa besar dampaknya dalam kehidupan masyarakat serta seberapa luas proyek itu diadopsi dan dimanfaatkan.

Peneliti pun mengajukan pertanyaan Apakah program Taman Maju Bersama dianggap berhasil. Berikut adalah tanggapan dari informan 3 dan 4:

“Evaluasi keberhasilan program Taman Maju Bersama mungkin dapat melibatkan penilaian terhadap perkembangan fisik taman baru, partisipasi masyarakat, dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan umum.”
(Informan 3)

“Menurut pandangan saya sebagai Staff Teknis Ruang Terbuka Hijau, untuk menilai keberhasilan Program Taman Maju Bersama, evaluasi yang melibatkan beberapa aspek penting perlu dilakukan. Pertama-tama, evaluasi dapat melibatkan penilaian terhadap perkembangan fisik taman baru yang telah dibangun dalam program ini. Perkembangan fisik taman dapat mencakup peningkatan luas area hijau, pembangunan fasilitas yang memadai, dan peningkatan estetika lingkungan. Evaluasi ini membantu untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan fisiknya. Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program. Tingkat partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan taman merupakan ukuran seberapa baik program ini telah memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Terakhir, evaluasi juga perlu memperhitungkan dampak positif program terhadap kesejahteraan umum. Dampak ini dapat mencakup peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan hubungan sosial dan interaksi antarwarga.” (Informan 4)

Hasil wawancara menyoroti pentingnya evaluasi keberhasilan program Taman Maju Bersama dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti perkembangan fisik taman baru, partisipasi masyarakat, dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan umum.

Lalu, peneliti bertanya tentang Apakah program Taman Maju Bersama dianggap berhasil. Berikut adalah tanggapan dari Informan 5:

“Kan kalau dari kacamata masyarakat umum, aku rasa sih cukup berhasil, ya. Soalnya kan, masyarakat menggunakan TMB di sekitar daerah rumahnya, karena aku lihat di wilayah keluarahan itu udah ada TMB. Kan salah satu contoh TMB itu kan yang di Tebet itu bisa masuk ke TMB, kali, ya. Itu aja kita liat kan di Tebet itu sangat rame pengunjung, mungkin emang bisa kita simpulkan udah cukup berhasil.” (Informan 5)

Dari hasil wawancara dengan Informan 5, dapat dipahami bahwa dari perspektif masyarakat umum, ia menganggap program TMB telah sukses, terutama berdasarkan tingginya partisipasi dan pemanfaatan fasilitas TMB di wilayah tertentu, seperti yang diamati di Tebet. Hal ini menunjukkan persepsi positif informan terhadap respons masyarakat terhadap program tersebut, yang dianggap sebagai indikator keberhasilan.

Berikut adalah tanggapan Informan 6:

“Kalau ditanya berhasil atau gak, itu kan parameternya banyak. Bisa jadi luasan RTH itu bertambah, bahwa taman di Jakarta dengan slogan TMB ini luasannya bertambah. Kemudian dari sisi perencanaannya, dengan branding TMB ini beberapa taman didesain lebih optimal.”

Hasil wawancara dengan Informan 6 menyoroti beragam parameter yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program TMB (Taman Maju Bersama) dalam konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. Menurut informan, penilaian keberhasilan tidak dapat hanya ditentukan dari satu sudut pandang. Ada beberapa parameter yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah penambahan luas RTH, yang menjadi indikator keberhasilan dari program TMB. Jadi, jika terdapat peningkatan luasan taman di Jakarta dengan menerapkan konsep TMB, itu dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan dalam implementasi program tersebut.

Selain dari segi luasan, informan juga menekankan pentingnya perencanaan. Melalui branding TMB, beberapa taman didesain secara lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penilaian keberhasilan, aspek perencanaan dan desain taman juga dianggap krusial. Dengan adanya branding TMB, peningkatan kualitas desain taman menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Keseluruhan pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi keberhasilan dari program TMB harus memperhatikan pertumbuhan luas RTH dan perbaikan kualitas perencanaan taman di Jakarta sebagai bagian dari upaya memajukan konsep Taman Maju Bersama.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan Bagaimana bapak/ibu mengevaluasi keberhasilan program ini, berikut adalah tanggapannya:

“Kalau untuk evaluasi dari aktivitas yang ada di dalam. Apakah taman itu sepi, terawat atau tidak. Kalau yg saya perhatikan di dlm pengawasan saya, semuanya berfungsi di dalam RTH itu masyarakat sudah melakukan kegiatan yang maksimal di dalamnya.” (Informan 2)

Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Informan 2 memberikan gambaran tentang bagaimana evaluasi terhadap keberhasilan suatu taman dilakukan. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat aktivitas yang terjadi di dalam taman. Informan menekankan pentingnya memeriksa apakah taman tersebut sepi atau ramai, apakah terawat dengan baik atau tidak. Fokus pengawasannya adalah pada fungsi taman sebagai tempat aktivitas masyarakat. Informan 2 menyoroti bahwa menurut pengamatannya, taman yang dia awasi berhasil karena masyarakat telah aktif melakukan berbagai kegiatan di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa bagi informan, keberhasilan sebuah taman tidak hanya dilihat dari keadaan fisiknya atau fasilitas yang tersedia, tetapi juga dari sejauh mana taman itu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat oleh masyarakat. Kesibukan dan aktivitas masyarakat di dalam taman menjadi penanda keberhasilan dan kegunaan taman sebagai ruang terbuka yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya peneliti bertanya tentang Bagaimana bapak/ibu mengevaluasi keberhasilan program ini, berikut adalah tanggapan dari informan 3 dan 4:

“Keberhasilan program dapat dievaluasi melalui pemantauan langsung terhadap peningkatan jumlah dan kualitas RTH, respons masyarakat, dan dampak positifnya terhadap lingkungan sekitar.” (Informan 3)

“Untuk mengevaluasi keberhasilan Program Taman Maju Bersama, beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan. Pertama, pemantauan langsung terhadap peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan indikator penting. Peningkatan jumlah dan kualitas RTH mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan dan pengelolaan taman yang dilakukan melalui program ini. Kedua, respons masyarakat juga menjadi faktor penentu. Evaluasi respons masyarakat dapat melibatkan survei, wawancara, atau forum diskusi untuk memahami persepsi, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat terhadap RTH yang telah dibangun dan dikelola. Terakhir, dampak positif terhadap lingkungan sekitar perlu dievaluasi. Dampak ini dapat mencakup perbaikan kualitas udara, peningkatan biodiversitas, penyerapan karbon, dan peningkatan estetika lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan RTH.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan program dapat dievaluasi melalui pemantauan langsung terhadap beberapa faktor, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), respons masyarakat, dan dampak positifnya terhadap lingkungan sekitar.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti sampaikan adalah mengenai Bagaimana bapak/ibu mengevaluasi keberhasilan program ini. Berikut adalah tanggapan Informan 5:

“Kalau menurutku liat dari masyarakatnya aja dateng ke suatu lokasi taman, rame pengunjung atau gak. Itu kan cara menilai secara awam, ya. Secara kasat mata, kalau memang rame, ya berarti memang masyarakat senang, butuh dengan adanya RTH di sekitar pemukiman mereka.

Itu aja kalau dari kacamata aku. Mungkin kalau dari kacamata pengambil kebijakan ya beda, ya.” (Informan 5)

Hasil wawancara dengan Informan 5 menyoroti pandangannya terhadap penilaian keberhasilan suatu Taman, terutama dari perspektif masyarakat yang memanfaatkannya. Informan mengungkapkan bahwa menurutnya, indikator keberhasilan sebuah taman adalah seberapa ramainya pengunjung yang datang ke lokasi taman tersebut. Bagi informan, jumlah pengunjung secara kasat mata menjadi tolok ukur keberhasilan, yang menandakan bahwa masyarakat menyukai dan membutuhkan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar tempat tinggal mereka.

Dengan kata lain, dapat diketahui Informan 5 mengukur keberhasilan sebuah taman dari sudut pandang respons masyarakat, terutama dari seberapa banyak pengunjung yang datang. Namun, informan juga menyadari bahwa penilaian ini dapat berbeda jika dilihat dari perspektif pengambil kebijakan, yang mungkin menggunakan kriteria atau parameter yang lebih luas dan mendalam dalam mengevaluasi keberhasilan sebuah taman atau RTH.

Berikut adalah tanggapan Informan 6:

“Sebetulnya program ini sudah berjalan di periode Gubernur sebelumnya. Dan ini adalah branding dari pengelolaan RTH di Jakarta. Kalau evaluasi ini kan sbtunya untuk memperbaiki menuju keberhasilan. Sebetulnya program yang sudah berjalan, apakah nanti namanya dirubah ya sebaiknya ini dilanjutkan saja, dengan proses perencanaan yang mengadopsi dari yang sebelumnya.” (Informan 6)

Hasil wawancara dengan Informan 6 menyoroti kontinuitas serta evaluasi terhadap program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta, khususnya dalam konteks program Taman Maju Bersama (TMB). Informan menyampaikan bahwa program TMB

sebenarnya sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Penekanan pada "branding" program ini menunjukkan bahwa TMB merupakan sebuah upaya untuk mengidentifikasi dan memperkenalkan pengelolaan RTH secara lebih luas dan terfokus kepada masyarakat.

Lebih lanjut, informan membahas pentingnya evaluasi untuk memperbaiki arah menuju keberhasilan. Evaluasi program ini tidak hanya ditujukan untuk menilai kinerja program, tetapi juga untuk memperbaiki dan mengarahkannya ke tingkat keberhasilan yang lebih baik di masa depan. Perubahan nama program sebagai bagian dari evaluasi juga menjadi poin penting yang disoroti oleh informan, namun, ia menyarankan untuk melanjutkan program yang sudah berjalan dengan tetap mengadopsi proses perencanaan dari periode sebelumnya.

4.2.2 Keberhasilan Sasaran

Peneliti pun bertanya tentang Bagaimana bapak/ibu menilai pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh program, berikut adalah tanggapan informan 3 dan 4:

“Pencapaian sasaran program dapat dinilai melalui pemantauan progres fisik, partisipasi masyarakat, dan survei dampak sosial ekonomi yang mungkin telah dilakukan.” (Informan 3)

“Menurut pandangan saya sebagai Staff Teknis Ruang Terbuka Hijau, untuk menilai pencapaian sasaran program, kita perlu memantau progres fisik, melibatkan partisipasi masyarakat, dan melakukan survei dampak sosial ekonomi yang mungkin telah dilakukan.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencapaian sasaran program dapat dievaluasi melalui pemantauan progres fisik, partisipasi masyarakat, dan survei dampak sosial ekonomi.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai Apakah ada indikator atau metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran, yang ditanggapi secara langsung oleh yang bersangkutan, yakni sebagai berikut:

“Kalau dilihat metode atau parameter kami hanya melihat dari jumlah pengunjung yang hadir di taman itu, apakah cukup diminati atau tidak, tapi sebagian besar itu diminati. Karena gini, semua taman itu boleh digunakan apa saja. Ada kegiatan komersil, ada kegiatan non-komersil. Kalau kegiatan komersil harus ada izin tentunya.” (Informan 2)

Pernyataan dari Informan 2 menggambarkan cara yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau popularitas sebuah taman. Metode ini berfokus pada jumlah pengunjung yang hadir di taman sebagai indikator utama diminatinya taman tersebut. Jumlah pengunjung dianggap sebagai parameter kunci untuk menilai apakah taman tersebut diminati oleh masyarakat atau tidak. Dalam konteks ini, kehadiran banyak pengunjung dianggap sebagai pertanda tingginya minat masyarakat terhadap taman.

Informan 2 menegaskan bahwa semua taman dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, baik komersial maupun non-komersial. Namun, untuk kegiatan yang bersifat komersial, izin tentu diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kegiatan komersial dalam taman diawasi secara ketat, dengan adanya peraturan dan izin yang mengatur hal tersebut.

Selain parameter jumlah pengunjung, Informan 2 juga menekankan pentingnya keberagaman kegiatan yang dapat dilakukan di taman. Hal ini menunjukkan bahwa taman tersebut dianggap sukses ketika dapat mendukung dan menjadi tempat bagi

berbagai jenis kegiatan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pernyataan Informan 2 menunjukkan bahwa evaluasi keberhasilan taman melibatkan aspek struktural, interaksi dengan lingkungan eksternal (jumlah pengunjung), kebijakan pengaturan kegiatan, serta adaptasi terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat (keberagaman kegiatan). Ini sesuai dengan teori Streers yang menekankan pentingnya faktor-faktor ini dalam mempengaruhi efektivitas organisasi dan mencapai tujuan.

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah ada indikator atau metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran. Berikut adalah tanggapan yang bersangkutan:

“Indikator keberhasilan sasaran dapat mencakup luas area taman baru, tingkat kehadiran masyarakat, dan survei kepuasan pengguna terhadap fasilitas RTH yang disediakan.” (Informan 3)

“Indikator keberhasilan sasaran dapat mencakup luas area taman baru, tingkat partisipasi masyarakat, dan survei kepuasan pengguna terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang disediakan.” (Informan 4)

Hasil wawancara menyoroti bahwa indikator keberhasilan sasaran program dapat mencakup luas area taman baru, tingkat kehadiran masyarakat, dan survei kepuasan pengguna terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disediakan.

Kemudian, peneliti bertanya Apakah ada indikator atau metode yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran. Berikut adalah tanggapannya:

“Apa, ya. Mungkin dari aspek umum aja, ya. Aspek apakah taman itu membantu mengurangi polusi itu kurang paham aku, ya. Kalau kayak gitu kan harus ada penelitian lebih

lanjut. Cuma dari aspek daya minat masyarakat aja, gitu.”
(Informan 5)

Dari hasil wawancara dengan Informan 5 memberikan pandangannya terhadap peran taman, terutama dalam mengurangi polusi. Informan mengungkapkan ketidakyakinannya terkait peran taman dalam mengurangi polusi udara atau lingkungan secara umum. Informan merasa kurang paham tentang hal tersebut, menyatakan bahwa aspek mengenai peran taman dalam mengurangi polusi memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dipahami dengan lebih baik. Informan mengindikasikan bahwa dari sudut pandang umum, dirinya meragukan pemahaman atau keyakinan akan peran taman dalam mengurangi polusi. Namun, informan menekankan bahwa fokus pandangannya lebih kepada sejauh mana minat masyarakat terhadap taman tersebut, bukan pada manfaat terkait lingkungan.

4.2.3 Kepuasan Terhadap Program

Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap program ini, yang ditanggapi langsung oleh informan 3 dan 4 seperti berikut:

“Tingkat kepuasan dapat diukur melalui survei langsung kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas RTH yang dikelola.” (Informan 3)

“Menurut pandangan saya sebagai Staff Teknis Ruang Terbuka Hijau, tingkat kepuasan dapat dinilai melalui observasi langsung terhadap interaksi dan aktivitas masyarakat di Ruang Terbuka Hijau yang telah dikelola oleh program.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola dapat diukur melalui survei langsung kepada masyarakat.

Lalu, peneliti mengajukan pertanyaan Bagaimana tingkat kepuasan bapak/ibu terhadap program ini, yang langsung ditanggapi oleh Informan 5:

“Puas banget, malah, puas. Bagus banget. Sangat mendukung, sangat puas, sebagai pengguna taman juga, ya.” (Informan 5)

Dari pernyataan Informan 5, tergambar pandangan yang sangat positif terhadap pengalaman dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan taman. Informan merasa sangat puas dan mendukung terhadap taman tersebut, bahkan menyebutnya sebagai sesuatu yang luar biasa atau sangat baik. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Informan 5 merasa terbantu dan merasakan manfaat yang signifikan sebagai pengguna taman. Dari ungkapannya, terlihat bahwa Informan 5 memiliki persepsi yang sangat positif terkait fasilitas taman yang digunakan, yang mungkin memberikan pengalaman yang memuaskan dan memberi dampak yang baik bagi kehidupannya.

Berikut adalah tanggapan Informan 6:

“Sebagai bagian dari masyarakat tentunya puas dengan adanya TMB. Karena taman-taman ini diciptakan dengan karakteristik tertentu, kemudian dirancang sedemikian rupa dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga hasilnya pun tidak jauh dari keinginan masyarakat yang berada di wilayah yang terbangun TMB.” (Informan 6)

Hasil wawancara dengan Informan 6 mencerminkan pandangan positif masyarakat terhadap program TMB (Taman Maju Bersama) dalam konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut informan, sebagai bagian dari masyarakat, ia merasa puas dengan keberadaan TMB dan melihatnya sebagai suatu pencapaian yang positif. Terdapat beberapa aspek kunci yang dapat dianalisis dari pernyataan ini.

Peneliti pun bertanya perihal Apakah ada umpan balik atau evaluasi dari masyarakat terkait program ini. Berikut adalah tanggapan dari yang bersangkutan:

“Pasti ada. Karena kita kan sekarang punya CRM, semacam pengaduan masyarakat. Itu pasti ada, dan itu menjadi perhatian kita untuk memperbaiki apabila ada sarana prasarana yang rusak. Kadang warga itu ada yang bandel, misal ada yang ngerokok atau apa, nah itu bisa jadi sarana bagi warga untuk mengevaluasi kegiatan apa saja yang ada di dalam taman.” (Informan 2)

Pernyataan dari Informan 2 di atas mencerminkan bagaimana adanya sarana pengaduan masyarakat, seperti CRM, digunakan untuk memantau dan mengevaluasi keadaan taman. CRM digunakan sebagai alat untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait kerusakan atau masalah infrastruktur di taman. Fokus utama dari alat ini adalah untuk memperbaiki fasilitas yang rusak dalam taman sebagai tanggapan terhadap keluhan yang diajukan oleh masyarakat.

Selain itu, informan menyoroti bahwa taman dapat menjadi sarana bagi warga untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang terjadi di dalamnya. Misalnya, perilaku warga yang melanggar aturan, seperti merokok, dapat dianggap sebagai kesempatan bagi warga untuk mengevaluasi dan mengomentari aktivitas yang terjadi di taman. Perilaku tersebut dianggap sebagai peluang bagi masyarakat untuk memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma atau kebijakan yang ada.

Dalam konteks ini, sistem pengaduan dan mekanisme evaluasi yang diperkenalkan oleh informan menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas taman dengan mengakomodasi masukan dari masyarakat. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan evaluasi, tercipta kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pengembangan taman, memastikan bahwa taman

tetap menjadi lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat yang menggunakannya.

Pertanyaan berikutnya adalah Apakah ada umpan balik atau evaluasi dari masyarakat terkait program ini, berikut adalah tanggapan informan 3 dan 4:

“Umpan balik dari masyarakat dapat menjadi indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.” (Informan 3)

“Respons masyarakat terhadap program ini memberikan umpan balik yang berharga untuk mengevaluasi keberhasilan serta mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa umpan balik dari masyarakat dianggap sebagai indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya, peneliti bertanya mengenai Apakah ada umpan balik atau evaluasi dari masyarakat terkait program ini, kepada Informan 5, yang langsung ditanggapi seperti berikut:

“Ditambah lagi, ya, taman-taman kayak gitu, ditambah lagi. Dan didekatkan dengan lingkungan masyarakat lokasinya. Jangan dilokasi yang gak ada pemukiman masyarakat, kan, siapa yang mau pake. Lebih enak, kan, dekat pemukiman, kayak yang contoh di Tebet itu, kan itu di dekat pemukiman, ya itu pas.” (Informan 5)

Dari pernyataan Informan 5, terlihat pandangannya terhadap pentingnya lokasi taman terkait dengan lingkungan masyarakat dan keberadaan pemukiman di sekitarnya. Informan menyatakan pentingnya menambah jumlah taman yang serupa dengan yang ada, serta meletakkannya di dekat lingkungan masyarakat. Dia

menekankan bahwa keberadaan taman yang dekat dengan pemukiman masyarakat akan lebih diminati dan digunakan, dibandingkan dengan taman yang jauh dari pemukiman.

Informan 5 menyatakan bahwa taman yang diletakkan di dekat pemukiman seperti yang terlihat di Tebet, merupakan contoh yang ideal. Lokasi taman yang dekat dengan pemukiman masyarakat dianggap sebagai hal yang pas atau sesuai. Menurut pandangan Informan 5, keberadaan taman yang terletak di lingkungan pemukiman masyarakat akan lebih diminati dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada penduduk setempat. Lokasi yang strategis ini memudahkan akses masyarakat untuk menggunakan taman, dan menurutnya, merupakan faktor penting untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas taman oleh masyarakat.

Peneliti pun bertanya mengenai Bagaimana tingkat kontribusi atau sumber daya yang telah diberikan untuk program ini, kepada Informan 1. Berikut tanggapannya:

“Kalau kita pasti, pertama atas nama Pemprov, kita menganggarkan. Lalu menyiapkan dokumen perencanaannya, tentunya kita dengan aturan pengadaan barang dan jasa. Kita membangun dengan kontraktor. Setelah terbangun, kita pelihara, tentunya kita harus menyesuaikan juga dengan kebiasaan warga sekitar. Misal kalau seandainya taman dibuka 24 jam, gak mungkin, nanti malah mengganggu. Jadi itu, itu kontribusi kita kalau ada yang rusak kita perbaiki. Tapi kontrol dari masyarakat juga ada. Biasanya komplek negatifnya. Kan ada aplikasi Cepat Respon Masyarakat. Jadi masyarakat boleh memberikan masukan, komplek, dan kami tindak juga.” (Informan 1)

Dalam data hasil wawancara dengan Informan 1, tergambar jelas bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengelola Program Taman

Maju Bersama. Langkah-langkah penganggaran, perencanaan, dan konstruksi yang diuraikan oleh informan mencerminkan pentingnya struktur organisasi yang baik dan teknologi yang digunakan dalam mencapai tujuan program ini. Selanjutnya, pemeliharaan taman dan penyesuaian dengan kebiasaan warga sekitar menggambarkan perhatian terhadap faktor lingkungan, sesuai dengan konsep ketergantungan organisasi pada lingkungannya. Meskipun tidak secara langsung disebutkan, pemahaman tentang perbedaan kemampuan, pandangan, motivasi, dan budaya individu dalam organisasi mungkin memainkan peran dalam implementasi program ini. Terakhir, kontrol melalui aplikasi Cepat Respon Masyarakat mencerminkan praktek manajemen partisipatif yang dapat meningkatkan efektivitas program ini.

Lalu, peneliti bertanya mengenai Bagaimana tingkat kontribusi atau sumber daya yang telah diberikan untuk program ini, berikut adalah tanggapannya:

“Karena ini kan suatu kegiatan strategis daerah atau bisa dibilang sebagai kegiatannya pak Gubernur sebelumnya. Jadi memang itu sudah kita anggarkan, artinya kita harus full support menjadikan yang tadinya ruang kosong saja menjadi taman, artinya dapat dikatakan kita sepenuhnya *full support* untuk kegiatan ini dalam hal pembiayaan.”
(Informan 2)

Pernyataan dari Informan 2 mencerminkan komitmen penuh terhadap pengembangan taman sebagai kegiatan strategis dalam daerah. Informan menekankan bahwa pengembangan taman merupakan bagian dari agenda gubernur sebelumnya, yang dianggap sebagai kegiatan strategis dalam daerah. Pengembangan taman ini diberikan dukungan penuh, baik dalam hal penganggaran maupun dukungan pembiayaan.

Peneliti pun bertanya tentang Bagaimana tingkat kontribusi atau sumber daya yang telah diberikan untuk program ini. Berikut adalah tanggapan informan 3:

“Kontribusi atau sumber daya yang diberikan untuk program dapat mencakup anggaran, tenaga kerja, serta dukungan dari sektor swasta atau masyarakat sipil.”

(Informan 3)

“Kontribusi atau sumber daya untuk program bisa berupa dana, tenaga kerja, serta dukungan dari pihak swasta atau masyarakat sipil.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kontribusi atau sumber daya yang diberikan untuk program, termasuk anggaran, tenaga kerja, serta dukungan dari sektor swasta atau masyarakat sipil, diakui sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan program.

Lalu, peneliti mengajukan pertanyaan tentang Bagaimana tingkat kontribusi atau sumber daya yang telah diberikan untuk program ini. Berikut adalah tanggapannya:

“Kayaknya, pemerintah itu emang lagi menggalakan. Aku soalnya karena bukan dibidangnya, jadi gak tau nih, tahun 2023 ini udah menganggarkan berapa titik lokasi pembangunan TMB. Nah itu sebenarnya datanya ada, mungkin bisa ditanyakan ke Dinas Pertamanan dan Kehutanan kali, itu berapa tahun 2023 ini mereka mau bikin berapa taman.” (Informan 5)

Dari pernyataan Informan 5 di atas, tergambar bahwa pemerintah sedang menggalakkan program pembangunan TMB. Meskipun informan bukan ahli dalam bidang tersebut, ia menyadari adanya upaya dari pemerintah dalam mempromosikan pembangunan TMB. Informan juga menyadari bahwa anggaran untuk lokasi pembangunan TMB pada tahun 2023 telah disiapkan, meskipun ia tidak memiliki informasi pasti mengenai jumlah titik

lokasi yang akan dibangun. Informan menyarankan untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai rencana pembangunan TMB tahun 2023 ini, dengan menghubungi instansi terkait seperti Dinas Pertamanan dan Kehutanan, yang mungkin memiliki data terkait jumlah taman yang akan dibangun pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah sedang aktif dalam pengembangan program TMB dan menyediakan anggaran untuk pembangunan, meskipun informan membutuhkan data lebih lanjut untuk mengetahui detail rencana pembangunan taman tersebut.

4.2.4 Tingkat *Input* dan *Output*

Peneliti pun bertanya mengenai Apakah ada data yang mencerminkan hasil atau output dari program ini. Informan 2 langsung mengutarakan tanggapannya yakni, “Kalau data berupa foto atau kegiatan atau monev itu ada”. Dapat diketahui bahwa Informan 2 menjelaskan bahwa foto-foto dan dokumentasi kegiatan telah terdokumentasikan sebagai hasil atau output dari program yang dibicarakan. Sementara itu, kegiatan pemantauan (monev) juga disebut sebagai bentuk data yang dimiliki terkait program tersebut. Dengan demikian, data tersebut memiliki format visual seperti foto, dokumentasi kegiatan, dan pemantauan yang merefleksikan capaian dan keluaran dari program yang sedang dilaksanakan.

Peneliti pun bertanya tentang Apakah ada data yang mencerminkan hasil atau output dari program ini, yang langsung ditanggapi oleh yang bersangkutan:

“Data yang mencerminkan hasil atau output program dapat melibatkan jumlah taman baru, luas area yang dikelola, dan jumlah kunjungan masyarakat.” (Informan 3)

“Data yang mencerminkan hasil atau output program dapat mencakup statistik tentang pertumbuhan jumlah

taman baru, perubahan luas area hijau yang dikelola, serta statistik kunjungan masyarakat ke area-area tersebut.”

(Informan 4)

Hasil wawancara menyoroiti bahwa data yang mencerminkan hasil atau output program dapat melibatkan jumlah taman baru, luas area yang dikelola, dan jumlah kunjungan masyarakat.

Selanjutnya, peneliti pun bertanya mengenai Apakah program ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Informan 2 menyampaikan tanggapannya “Kalau saya bilang berhasil. Karena semua TMB yang dibangun itu dimanfaatkan oleh masyarakat”. Dari Informan 2 tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pandangannya program TMB ini telah berhasil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua TMB yang telah dibangun telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Informan 2 menegaskan bahwa ukuran keberhasilan dari program tersebut adalah sejauh mana TMB yang dibangun telah digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, bagi informan, keberhasilan program diukur dengan tingkat pemanfaatan fasilitas yang dibangun oleh masyarakat.

Peneliti bertanya pula Apakah program ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara menyeluruh, yang langsung ditanggapi oleh informan 3:

“Keberhasilan program secara menyeluruh dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH.” (Informan 3)

“Program ini telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami sejauh mana pencapaian tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta lingkungan sekitar.”

(Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan program secara menyeluruh dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4.2.5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Peneliti pun bertanya tentang Apakah ada indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini, berikut tanggapan dari informan 3 dan 4:

“Indikator untuk mengukur pencapaian tujuan mungkin melibatkan parameter seperti luas area yang dikelola, tingkat partisipasi masyarakat, dan perubahan positif dalam kualitas lingkungan.” (Informan 3)

“Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan program ini antara lain meliputi pertumbuhan jumlah taman, luas area hijau yang dikelola, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator untuk mengukur pencapaian tujuan program dapat melibatkan parameter seperti luas area yang dikelola, tingkat partisipasi masyarakat, dan perubahan positif dalam kualitas lingkungan.

Peneliti pun bertanya Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini. Informan 1 pun secara langsung menanggapi sebagai berikut:

“Kendalanya pasti, pertama kita yang pasti ada keterbatasan anggaran, lalu ada kejadian Covid kemarin itu memperlambat proses kita. Refkosing anggaran, ya. Jadi, anggarannya untuk RTH itu berkurang, diprioritaskan menangani Covid. Lalu, kendala lainnya, pemahaman masyarakat terkait konsep sebuah taman,

masih belum baik, dan juga tim yang terlibat dalam hal ini masih perlu berprogres untuk menuju lebih baik, seperti konsultannya. Lalu dari tim internal kami juga begitu, belum berada di posisi yang semuanya berperan dengan baik.” (Informan 1)

Data hasil wawancara menggambarkan beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan sebuah organisasi, dalam hal ini adalah proyek pembangunan taman-kota. Kendala utama yang disebutkan adalah keterbatasan anggaran dan adanya pandemi Covid-19 yang memperlambat proses. Hal ini berkaitan dengan faktor yang pertama dalam teori Streers, yaitu struktur dan teknologi dalam organisasi sangat mempengaruhi proses dan pencapaian tujuan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam membangun taman-kota, sehingga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep taman dan peran konsultan masih kurang, serta tim internal yang belum berada di posisi yang ideal.

Peneliti bertanya Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini, yang langsung ditanggapi sebagai berikut:

“Mungkin kalau TMB ini kan penyebutan dari Gubernur sebelumnya, ketika ganti pimpinan, meskipun sebenarnya sama, namanya berubah. Itu terus berlanjut, cuman namanya tidak lagi TMB, tapi menjadi pembangunan RTH taman.” (Informan 2)

Dalam hasil wawancara tersebut, Informan 2 menyampaikan bahwa istilah TMB (Taman Maju Bersama) merupakan istilah yang berasal dari masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya. Meskipun esensinya tetap sama, namun setelah terjadi pergantian kepemimpinan, istilah tersebut mengalami perubahan. Program yang sama, yang sebelumnya dikenal sebagai Taman Maju Bersama,

tetap dilanjutkan, namun dengan perubahan istilah menjadi pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) taman. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pergantian kepemimpinan, program yang sudah ada tetap diteruskan dengan fokus pada pengembangan ruang terbuka hijau, meskipun ada perubahan dalam istilah dan penyebutannya.

Hal ini menggambarkan kontinuitas program pembangunan taman sebagai bagian dari kebijakan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Meskipun terjadi perubahan dalam kepemimpinan dan terminologi yang digunakan, esensi dari program tersebut untuk pengembangan taman dan ruang terbuka hijau tetap dijalankan. Upaya ini menunjukkan kesinambungan dari rencana pembangunan kota yang memprioritaskan pembangunan ruang terbuka untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Peneliti selanjutnya bertanya tentang Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini, yang langsung ditanggapi seperti berikut:

“Kendala atau tantangan dalam implementasi program dapat melibatkan aspek perizinan, partisipasi masyarakat, atau masalah teknis yang mungkin muncul selama pembangunan taman.” (Informan 3)

“Kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini meliputi keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, kondisi lingkungan yang kompleks, serta koordinasi antarstakeholder yang diperlukan untuk kesuksesan program.” (Informan 4)

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kendala atau tantangan dalam implementasi program, seperti aspek perizinan, partisipasi masyarakat, atau masalah teknis yang mungkin muncul selama pembangunan taman, diakui sebagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program.

Lalu, peneliti bertanya perihal Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini, berikut adalah tanggapan dari Informan 5”

“Pedagang kaki lima, kalau bisa sih murni aja taman, lah, gak usah ada pedagang kaki lima. Cuman kan di kota besar susah, ya. Di mana ada gula, pasti ada semut, ya. Ada aja daya tariknya, dateng aja mereka itu, ya, gerobak-gerobak itu. Itu juga jadi tugas pemerintah, kali buat memikirkan adanya tantangan pedagang kaki lima, bagaimana mengaturnya, jangan sampai malah jadi kumuh.” (Informan 5)

Dalam pernyataan Informan 5 di atas, pandangan terhadap adanya pedagang kaki lima di sekitar taman. Meskipun ia menginginkan agar taman tetap murni tanpa adanya pedagang kaki lima, dia menyadari bahwa di kota besar, terutama dalam konteks urban, ini menjadi sebuah tantangan. Ia menggunakan analogi "di mana ada gula, pasti ada semut" untuk menggambarkan bagaimana daya tarik sebuah tempat, seperti taman, akan selalu menarik berbagai pihak, termasuk pedagang kaki lima yang cenderung datang dengan gerobaknya. Informan menyatakan bahwa ini merupakan tugas pemerintah untuk memikirkan cara mengatasi tantangan yang muncul akibat keberadaan pedagang kaki lima, dengan memastikan pengaturan yang tepat agar keberadaan mereka tidak membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan taman yang bersih dan tertata dengan tantangan kehadiran pedagang kaki lima, yang membutuhkan regulasi dan pengaturan yang tepat dari pemerintah.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan Apakah ada rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas program

Taman Maju Bersama di masa depan, kepada Informan 1 yang langsung ditanggapi:

“TMB, sih, beda pimpinan beda lagi programnya. Sekarang ini TMB sudah gak ada, jadi RTH aja. Ini sudah saya pikirkan dari dulu, karena dari masing-masing pimpinan itu politik, ya. Jadi, masing-masing pengen langsung mengena ke masyarakat. Tapi, kami udah sepakat RTH. Tapi kalau untuk branding ya itu TMB, kalau untuk sekarang ya RTH. Jadi, kalau bicara kelanjutan dari branding ini, secara kata-perkata gak ada kelanjutannya. Tapi, kalau bicara kontennya, itu ya bottom up. Itu tetap ada.” (Informan 1)

Data hasil wawancara di atas menggambarkan perubahan nama organisasi dari TMB menjadi RTH, yang terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan. Informan juga menyatakan bahwa masing-masing pimpinan cenderung memiliki program yang berbeda-beda tergantung pada agenda politiknya.

Selanjutnya, peneliti pun bertanya mengenai Apakah ada rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas program Taman Maju Bersama di masa depan?

Berikut adalah tanggapan Informan 2:

“Kalau rekomendasi, paling lokasi mungkin bisa dipilih lokasi yang memang berada di lingkungan yang masyarakat butuh, meskipun saat ini sudah tercapai, tapi bisa dieksplor lagi, area mana saja yang masyarakat butuh. Tapi memang kembali lagi apakah lahan yang kosong itu ada di sana atau tidak.” (Informan 2)

Dari pernyataan Informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa ia menekankan pentingnya memilih lokasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Meskipun saat ini kebutuhan mungkin telah terpenuhi, tetapi masih terdapat potensi untuk menjelajahi dan mengeksplorasi

area mana yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pemilihan lokasi yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat di lingkungan tertentu dianggap sebagai aspek penting. Namun, Informan 2 juga menyadari bahwa pemilihan lokasi juga bergantung pada ketersediaan lahan yang kosong di area yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan taman, aspek ketersediaan lahan kosong di lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi yang tepat.

Peneliti pun bertanya tentang Apakah ada rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas program Taman Maju Bersama di masa depan, yang langsung ditanggapi sebagai berikut:

“Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program dapat mencakup perbaikan dalam manajemen proyek, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan dalam pemantauan dan evaluasi.” (Informan 3)

“untuk meningkatkan efektivitas program Taman Maju Bersama di masa depan, penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarstakeholder, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan terhadap program ini.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program melibatkan perbaikan dalam manajemen proyek, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan dalam pemantauan dan evaluasi.

Peneliti pun bertanya mengenai Apakah ada rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas program Taman Maju Bersama di masa depan. Berikut adalah tanggapan yang bersangkutan:

“Ya paling itu, lokasi TMB di dekatkan dengan lingkungan pemukiman masyarakat, terus mungkin harus disiapkan juga, ini, ya. Harusnya kan taman itu natural, ya, tapi kan kenyataannya kayak yang di Tebet itu butuh lahan parkir. Ternyata yang dateng itu, peminatnya bukan cuman warga di sekitar tebet, soalnya kan warga yang di luar daerah, provinsi DKI juga kesitu, kan.” (Informan 5)

Dalam pernyataan Informan 5 diatas, menjelaskan tentang tantangan yang muncul dalam pengelolaannya. Informan menyatakan kebutuhan untuk menempatkan TMB di lokasi yang dekat dengan pemukiman masyarakat, menunjukkan kesadaran akan kebutuhan ruang terbuka hijau di lingkungan yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Namun, ia juga menyadari bahwa kenyataannya tidak selalu sesuai dengan idealisme tersebut. Ia mengakui bahwa idealnya, taman seharusnya merupakan ruang yang natural, namun, dalam praktiknya, kebutuhan akan lahan parkir juga menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bagaimana kebutuhan masyarakat mengakses TMB, baik dari penduduk setempat maupun dari luar daerah, termasuk penduduk dari provinsi DKI, mengakibatkan perlunya pengaturan yang tepat dalam pengelolaan TMB, termasuk mempertimbangkan kebutuhan lahan parkir.

“Kalau rekomendasi sebetulnya kan saya sudah bilang tadi, sudah berjalan lumayan bagus ya, untuk perencanaan branding TMB ini. Memang partisipasi masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan TMB.” (Informan 6)

Dari kutipan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa informan 6 menekankan kesuksesan dalam perencanaan branding TMB. Ini menandakan bahwa pendekatan yang diambil dalam mempromosikan program ini melalui branding dianggap efektif. Upaya untuk memberi identitas yang jelas melalui brand TMB tampaknya telah memberikan hasil positif dalam membangun citra

dan kesadaran masyarakat akan program pengelolaan RTH. Informan 6 pun menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah dilibatkan dalam perencanaan TMB. Ini menunjukkan bahwa program tersebut menerapkan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat setempat terlibat dalam proses perencanaan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan kebutuhan lokal dan memungkinkan solusi yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Terakhir, peneliti bertanya mengenai Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya. Berikut adalah tanggapan informan 3 dan 4:

“Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui kampanye sosialisasi, keterlibatan aktif dalam perencanaan taman, dan menciptakan forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.” (Informan 3)

“Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting. Upaya untuk meningkatkannya bisa melibatkan penyuluhan, pelatihan, dan forum partisipatif untuk memperkuat keterlibatan serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan RTH secara bersama-sama.” (Informan 4)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui kampanye sosialisasi, keterlibatan aktif dalam perencanaan taman, dan menciptakan forum dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat dalam pengelolaan RTH dan apakah ada upaya untuk meningkatkannya. Berikut adalah tanggapan Informan 5:

“Kalau dari aku, nih, pengunjung, ya. paling partisipasi kita untuk RTH itu jangan buang sampah sembarangan, ya. Maksudnya kita selama di sana, ya kita menjaga lah

namanya itu kan RTH. Kan harusnya bersih, kan, jadi kita semua nyaman gitu berlama-lama di situ.” (Informan 5)

Dalam pernyataan Informan 5 di atas, tergambar kesadaran dan pandangan mengenai tanggung jawab pengunjung terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH). Informan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan RTH dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa baginya, partisipasi dalam merawat lingkungan adalah kunci utama untuk menjaga RTH tetap bersih dan nyaman untuk dinikmati oleh pengunjung lainnya. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendorong kesadaran kolektif untuk memelihara ruang publik agar tetap nyaman dan layak untuk digunakan bersama.

“Mungkin kedepannya lebih digali lagi kemauan dari masyarakat terhadap penyediaan RTH diwilayahnya ini seperti apa, jadi ketika nanti sudah terbangun, sudah mewakili aspirasi dari masyarakat itu sendiri, jadi taman itu berfungsi efektif, baik bersosialisasi atau kegiatan warganya tersebut.” (Informan 6)

Dalam kutipan hasil wawancara di atas, Informan 6 menyoroti pentingnya memahami keinginan masyarakat terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayahnya. Pernyataannya menunjukkan upaya untuk lebih mendalami preferensi masyarakat dalam proses pengembangan RTH, sehingga hasil akhir dari pembangunan tersebut dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Hal ini berarti memperhatikan keinginan masyarakat saat tahap perencanaan dan pembangunan RTH merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas fungsionalitas RTH. Dengan mewakili aspirasi masyarakat dalam desain dan pengembangan, RTH diharapkan dapat menjadi tempat yang efektif bagi aktivitas sosial, kegiatan warga, serta pertemuan masyarakat. Pendekatan ini

menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa RTH tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga memperhitungkan kebutuhan sosial, budaya, dan kegiatan komunitas yang relevan dengan wilayah tempat RTH tersebut berada. Dengan demikian, pendekatan ini menyoroti bahwa kesuksesan RTH bukan hanya tentang keberadaannya secara fisik, tetapi juga tentang bagaimana ruang tersebut dapat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.